



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

**BPKA KOTA PASURUAN
TAHUN 2024**



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

Jalan Pahlawan No. 22 Pekuncen, Kota Pasuruan, Jawa Timur
Kode Pos 67126, Telepon (0343) 412860
E-mail : bpkakopas@gmail.com, Laman : bpka.pasuruankota.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
NOMOR : 188/2142/423.201/2023**

TENTANG

**PENETAPAN RENCANA KERJA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
TAHUN 2024**

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 19 tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan tentang Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 tahun 2007 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 tahun 2010 tentang Perubahan atas peraturan daerah Kota Pasuruan Nomor 02 tahun 2007 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahunan 2021-2026;
11. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah;
12. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024;
14. Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan Tahun 2024 sebagaimana

tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA** : Memerintahkan kepada Sekretaris dan Kepala Bidang pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan untuk memedomani Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan Tahun 2024 ini dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran atau RKA kegiatan tahun berkenaan.
- KETIGA** : Memerintahkan kepada Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pasuruan
Pada Tanggal : 30 Desember 2023

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET
KOTA PASURUAN



Drs. MOCHAMAD AMIEN, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19691003 199003 1 006



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

Jalan Pahlawan No. 22 Pekuncen, Kota Pasuruan, Jawa Timur
Kode Pos 67126, Telepon (0343) 412860

E-mail : bpkakopas@gmail.com, Laman : bpka.pasuruankota.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
KOTA PASURUAN
NOMOR : 188/2143/423.201/2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA PASURUAN
TAHUN 2024**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan Tahun 2024, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) dengan menetapkannya dalam Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
10. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pasuruan 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 05);
11. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021 Nomor 4);
12. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset;
13. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 42 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
14. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 19 tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pasuruan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- PERTAMA** : Mengesahkan Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari putusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan Tahun 2024 dimaksud dalam dictum Pertama Keputusan ini, melaksanakan tugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen Rencana Kerja Tahun 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pasuruan
Pada Tanggal : 30 Desember 2023

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET
KOTA PASURUAN



Drs. MOCHAMAD AMIEN, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19691003 199003 1 006

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
KOTA PASURUAN

NOMOR 188/2143/423.021/ 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
KOTA PASURUAN

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA TAHUN 2024
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA PASURUAN**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3
1.	Kepala Badan	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris	Ketua
3.	Kepala Bidang Anggaran	Wakil Ketua
4.	Kepala Bidang Aset	Wakil Ketua
5.	Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi	Wakil Ketua
6.	Jabfung dan Koordinator Penyusunan Program dan Keuangan	Sekretaris
7.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	Anggota

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET
KOTA PASURUAN



Drs. MOCHAMAD AMIEN, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19691003 199003 1 006

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan berkat, rahmat dan hidayah-Nya, Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan Tahun 2024 ini dapat tersusun tepat pada waktunya.

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan Tahun 2024, merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun, dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai rencana kerja yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan pada tahun anggaran 2024.

Melalui Rencana Kerja Perangkat Daerah diharapkan dapat diperoleh gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran yang akan dilaksanakan dan target-target yang rencananya akan dicapai guna melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan bersih, bertanggung jawab dan transparan.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan Tahun 2024 ini dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan tugas-tugas selama setahun agar dapat melaksanakan kinerja kedepan lebih terarah, efektif dan efisien.

Pasuruan, Januari 2024

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET
KOTA PASURUAN



Drs. MOCHAMAD AMIEN, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19691003 199003 1 006

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel.....	iii
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	16
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	18
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	19
BAB III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	30
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	30
3.2 Tujuan dan sasaran Rencana Kinerja Perangkat Daerah	31
BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	32
BAB V Penutup.....	43

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2023.....	10
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 2023	17
Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024.....	20
Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025.....	33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Kota Pasuruan telah menetapkan visi dan misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026 sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah lima tahun ke depan. Untuk mewujudkan tercapainya visi-misi yang tertuang dalam RPJMD tersebut, maka perlu disusun perencanaan pembangunan tahunan dalam wujud Rencana Kerja Pemerintahan Daerah sebagai dasar bagi Perangkat Daerah membuat perencanaan program, kegiatan, dan sub-kegiatan pada tahun berkenaan. Perencanaan program, kegiatan, dan sub-kegiatan tahunan yang disusun oleh Perangkat Daerah tersebut dituangkan dalam dokumen perencanaan berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Secara substantif Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen rancangan awal perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Kewajiban kepala PD membuat Rencana Kerja tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mengamanatkan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Renja-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD.

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah selain mengacu kepada RKPD, juga harus sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah yang merupakan pedoman bagi PD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran yang lebih teknis dari Renstra OPD. Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat juga perencanaan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan PD. Kualitas penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah akan berpengaruh terhadap kualitas pelayanan OPD yang akan diberikan kepada masyarakat penggunaannya.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tersebut di atas, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset selaku PD berkewajiban untuk

menyusun Rencana Kerja yang berisi kebijakan, program, kegiatan, dan sub-kegiatan untuk dilaksanakan pada tahun 2024 sebagai penjabaran dari dokumen RPJMD 2021-2026, RKPD tahun 2023, dan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset tahun 2021-2026. Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset tahun 2024 merupakan dokumen rencana pembangunan yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoptimalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja tahun sebelumnya, sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset.

Dokumen Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan Tahun 2024 memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai di Tahun 2024, indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya, program, kegiatan, sub-kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Selain itu, Dokumen Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan Tahun 2024 juga disusun dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan dan tantangan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan dalam hal penyusunan perencanaan fisik-prasarana, penyusunan data dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan dan pelayanan administrasi di lingkup Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

- Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
 10. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pasuruan;
 11. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021-2026;
 12. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 32 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
 13. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset; dan

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan Tahun 2024 adalah sebagai pedoman dan arah dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan sub-kegiatan Tahun 2024 bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan ini adalah:

1. Sebagai pengendali kegiatan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan agar terarah dan sesuai dengan Visi, Misi, Strategi, Kebijakan dan Program yang telah ditetapkan;
2. Tercapainya sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan;
3. Sebagai pedoman penyusunan kegiatan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan;
4. Sebagai dasar dalam mengevaluasi kinerja kegiatan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan.

Dengan demikian dokumen Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan Tahun 2024 selanjutnya dijadikan pedoman dan arah didalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024 oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan Tahun 2024 disusun dalam 5 (lima) Bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah, proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Rencana Kerja K/L dan Rencana Kerja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian

Renstra Perangkat Daerah

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM), maupun terhadap Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah, dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan *MDGs (Millenium Development Goals)*. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan, yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan serta penjelasannya. Memuat catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya adanya rumusan program dan kegiatan baru serta besaran pagu anggaran yang berbeda yang disajikan dalam bentuk tabel.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan sasaran Rencana Kinerja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan/sub-kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BPKA Tahun Lalu dan Capaian Renstra BPKA

Evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan Tahun 2022 dapat disajikan sebagai berikut :

➤ Tabel Pencapaian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Persentase penyusunan anggaran sesuai ketentuan	100%	100%	100%
		Persentase laporan keuangan daerah sesuai ketentuan	100%	100%	100%
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah	Persentase administrasi barang/aset daerah sesuai ketentuan	100%	100%	100%

Dari masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Persentase jumlah PD yang menyelesaikan penyusunan dokumen anggaran sesuai ketentuan

Dengan target sebesar 100% dan terealisasi 100% atau tercapai 100%. Capaian ini berdasarkan jumlah PD yang menyelesaikan dokumen anggaran sesuai ketentuan, dari total 33 PD di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan semuanya telah menyelesaikan dokumen anggaran tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Capaian indikator didukung oleh tertibnya PD dalam penyampaian dokumen.

2. Persentase jumlah PD yang menyampaikan laporan keuangan sesuai ketentuan

Dengan target sebesar 100% dan terealisasi 100% atau tercapai 100%. Capaian ini berdasarkan jumlah PD yang menyampaikan laporan keuangan sesuai ketentuan, dari total 33 PD di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan semuanya telah menyampaikan laporan keuangan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

3. Persentase jumlah PD yang menyampaikan laporan barang milik daerah sesuai ketentuan

Pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi 100% atau tercapai 100%. Capaian ini berdasarkan jumlah PD yang menyampaikan laporan barang milik daerah sesuai ketentuan, dari total 33 PD di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan semuanya telah menyampaikan laporan barang milik daerah tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Pada tahun 2022 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan melaksanakan 11 kegiatan dan 39 sub kegiatan. Capaian Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan terhadap target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah 32 sub kegiatan telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, sedangkan 7 sub kegiatan tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Secara umum program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa permasalahan, diantaranya:

1. Permasalahan utama dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu masa transisi atas implementasi aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang disediakan oleh Kementerian Dalam Negeri.
2. Tidak terlaksananya sosialisasi terkait SP2D online yang rencananya dilakukan pada tahun 2021 terkendala aplikasinya belum terbangun secara sempurna.
3. Kegiatan terkait rencana perubahan kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi Pemerintah Daerah belum dapat dilaksanakan dikarenakan terbatasnya sumber daya manusia BPKP selaku narasumber.

4. Pelaksanaan kegiatan pembinaan akuntansi terkait penyusunan Laporan Keuangan belum dapat dilaksanakan secara optimal, akibat adanya pembatasan untuk kegiatan pengumpulan orang karena pandemi Covid-19

Berdasarkan permasalahan yang timbul dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut, maka perbaikan yang harus dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan antara lain:

1. Melakukan penyempurnaan dan perbaikan secara berkelanjutan terhadap program/kegiatan/sub-kegiatan yang direncanakan, agar sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada dengan mempertimbangkan permasalahan yang mungkin timbul;
2. Meningkatkan peran serta seluruh jajaran di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan didalam penyusunan anggaran program/kegiatan/sub-kegiatan, sehingga anggaran yang disusun sesuai dengan kebutuhan organisasi dalam mencapai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan;
3. Agar pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan sosialisasi dan/atau bimbingan teknis bagi pegawai pengelola keuangan daerah;
4. Melaksanakan kegiatan pelatihan aplikasi SIPD yang disediakan oleh Kementerian Dalam Negeri kepada para pengelola keuangan di seluruh OPD;
5. Diupayakan secepatnya agar SP2D online dapat diimplemtasikan melalui kerjasama antara Pemerintah Kota Pasuruan dengan BPKP dan Bank Jatim;
6. Diperlukan upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola keuangan daerah melalui kegiatan sosialisasi atau bimbingan teknis terkait penyusunan Laporan Keuangan Daerah;
7. Mempercepat melakukan perubahan Peraturan Walikota Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pasuruan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Pasuruan;

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 2.1

Tabel 2.1 Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

Kode	Urusan Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023					
			Target	Satuan		Target	Realisasi	Tingkat Realisasi		Realisasi s/d Maret 2023	Tingkat Capaian (%)				
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
TAHUN 2022															
5	02	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase dokumen perencanaan, capaian kinerja dan laporan keuangan, kepegawaian, barang yang disusun tepat waktu	100	%	87	100	87	100			
5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	100	%	100	100	100	100			
5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	4	dok	4	4	4	100			
5	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja yang disusun	4	dok	4	4	4	100			

5	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja yang disusun	4	dok	4	4	4	100			
5	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen arsip in aktif BPKA yang tertata rapi dan tersusun rapi	1000	arsip	1,000	1000	1,000	100			
5	02	01	2.02		Administrasi	Persentase laporan	100	%	100	100	100	100			
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan	Jumlah ASN yang	14	bln	14	14	14	100			
5	02	01	2.02	04	Koordinasi dan	Jumlah laporan	12	dok	12	12	12	100			
						Jumlah laporan	4	dok	4	4	4	100			
5	02	01	2.02	05	Koordinasi dan	Jumlah laporan	2	dok	2	2	2	100			
5	02	01	2.02	07	Koordinasi dan	Jumlah laporan	4	dok	4	4	4	100			
					Penyusunan	Jumlah dokumen	6	jenis	6	6	6	100			
5	02	01	2.02	08	Penyusunan	Jumlah laporan	1	lap	1	1	1	100			
5	02	01	2.05		Administrasi	Persentase SDM	100	%	33	100	33	33			
5	02	01	2.05	10	Sosialisasi	Jumlah pelaksanaan	12	bln	4	12	4	33			
5	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis	Jumlah pegawai	3	org	-	3	-	-			
5	02	01	2.06		Administrasi Umum	Persentase	100	%	96	100	96	96			
5	02	01	2.06	01	Penyediaan	Jumlah jenis	10	jenis	10	10	10	100			
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang	Jumlah barang,	18	jenis	18	18	18	100			
5	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan	Jumlah bahan	4	jenis	4	4	4	100			
5	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan	Jumlah makanan	680	kotak	600	680	600	88			
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan	Jumlah rapat	428	kali	400	428	400	93			
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang	Persentase	100	%	100	100	100	100			
5	02	01	2.07	06	Pengadaan	Jumlah peralatan	8	unit	8	8	8	100			
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa	Persentase	100	%	82	100	82	82			
5	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa	Jumlah materai yang	450	lembar	225	450	225	50			
5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa	Jumlah kebutuhan	12	bln	12	12	12	100			
5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa	Jumlah penyediaan	9	org	8	9	8	89			
						Jumlah pembelian	28	jenis	28	28	28	100			

5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa	Jumlah penyediaan	9	org	8	9	8	89			
						Jumlah pembelian	28	jenis	28	28	28	100			
						Jumlah alat	1	jenis	1	1	1	100			
						Jumlah alat tulis	69	jenis	69	69	69	100			
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang	Persentase barang	100	%	100	100	100	100			
5	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah kendaraan	20	unit	20	20	20	100			
						Jumlah jasa STNK	20	unit	20	20	20	100			
5	02	01	2.09	05	Pemeliharaan	Jumlah peralatan	50	unit	50	50	50	100			
5	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Reha	Jumlah peralatan	125	unit	125	125	125	100			
5	02	01	2.09	11	Pemeliharaan/Reha	Volume gedung	3170	m2	3,170	3170	3,170	100			
5	02	02			Program Pengelolaan	Persentase jumlah	100	%	100	100	100	100			
						Persentase jumlah	100	%	100	100	100	100			
5	02	02	2.01		Koordinasi dan	Persentase	100	%	100	100	100	100			
5	02	02	2.01	01	Koordinasi dan	Jumlah dokumen	2	dok	2	2	2	100			
5	02	02	2.01	02	Koordinasi dan	Jumlah dokumen	2	dok	2	2	2	100			
5	02	02	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah dokumen	4	dok	4	4	4	100			
						Prosentase	90	%	90	90	90	100			
5	02	02	2.01	08	Koordinasi dan	Jumlah dokumen	4	dok	4	4	4	100			
5	02	02	2.01	09	Koordinasi dan	Jumlah pengelola	82	org	82	82	82	100			
5	02	02	2.01	11	Koordinasi	Jumlah dokumen	2	dok	2	2	2	100			
						Jumlah PNS yang	33	PD	33	33	33	100			
						Persentase proses	90	%	90	90	90	100			
5	02	02	2.02		Koordinasi dan	Prosentase	100	%	100	100	100	88			
5	02	02	2.02	01	Koordinasi dan	Terlaksananya	12	bln	12	12	12	100			
5	02	02	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah laporan	1	buku	1	1	1	100			
						Jumlah dokumen	3	dok	3	3	3	100			
5	02	02	2.02	09	Rekonsiliasi Data	Jumlah bank yang	4	kali	4	4	4	100			
5	02	02	2.02	11	Pembinaan Penatausahaan	Jumlah	5	keg	5	5	5	50			
						Jumlah peserta	110	org	-	110	-	-			
5	02	02	2.03		Koordinasi dan	Prosentase	100	%	100	100	100	100			
5	02	02	2.03	01	Koordinasi	Jumlah dokumen	2	dok	2	2	2	100			
5	02	02	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah dokumen	2	dok	2	2	2	100			
						Jumlah SKPD yang	33	PD	33	33	33	100			
5	02	02	2.03	08	Penyusunan Analisis	Jumlah rapat	11	kali	11	11	11	100			

5	02	02	2.03	10	Penyusunan Sistem	Jumlah dokumen	1	dok	1	1	1	100			
5	02	02	2.03	11	Pembinaan	Jumlah peserta	110	org	110	110	110	100			
5	02	03			Program Pengelolaan	Persentase jumlah	100	%	100	100	100	100			
5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang	Persentase	100	%	100	100	100	100			
5	02	03	2.01	05	Penatausahaan	Jumlah SKPD dalam	33	PD	33	33	33	100			
5	02	03	2.01	07	Pengamanan Barang	Jumlah kasus	20	kasus	-	20	-	210			
						Jumlah bangunan	8	unit	8	8	8				
						Jumlah gedung	50	gedung	50	50	50				
						Jumlah kendaraan	100	unit	100	100	100				
						Jumlah tanah aset	30	bidang	240 bidang	30	240 bidang				
5	02	03	2.01	08	Penilaian Barang	Jumlah bidang tanah	50	bidang	-	50	-	-			
5	02	03	2.01	09	Pengawasan dan	Jumlah proses	12	kali	12	12	12	100			
5	02	03	2.01	11	Rekonsiliasi dalam	Jumlah SKPD dalam	33	PD	33	33	33	100			
5	02	03	2.01	12	Penyusunan	Jumlah dokumen	4	dok	4	4	4	100			
5	02	03	2.01	13	Pembinaan	Jumlah SKPD yang	33	PD	33	33	33	100			
						Jumlah SKPD yang	33	PD	33	33	33	100			

TAHUN 2023

5	02	01			Program Penunjang	Persentase	100	%				100	15.33	15.33
5	02	01	2.01		Perencanaan,	Persentase dokumen	100	%				100	8.33	8.33
5	02	01	2.01	01	Penyusunan	Jumlah Dokumen	32	Dokumen				8	2	25
5	02	01	2.01	06	Koordinasi dan	Jumlah Laporan	12	Laporan				3	0	0
5	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja	Jumlah Laporan	4	Laporan				1	0	0
5	02	01	2.02		Administrasi	Persentase laporan	100	%				100	4.12	4.12
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan	Jumlah Orang yang	148	Orang/bu				37	37	100
5	02	01	2.02	04	Koordinasi dan	Jumlah Dokumen	64	Dokumen				16	0	0
5	02	01	2.02	05	Koordinasi dan	Jumlah Laporan	8	Laporan				2	0	0
5	02	01	2.02	07	Koordinasi dan	Jumlah Laporan	96	Laporan				24	3	12.5
5	02	01	2.02	08	Penyusunan	Jumlah Dokumen	4	Dokumen				1	0	0
5	02	01	2.03		Administrasi Barang	Persentase laporan	100	%				100	0	0
5	02	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan	Jumlah Laporan	12	Laporan				3	0	0
5	02	01	2.05		Administrasi	Persentase SDM	100	%				100	0	0

5	02	01	2.05		Administrasi	Persentase SDM	100	%					100	0	0
5	02	01	2.05	03	Pendataan dan	Jumlah Dokumen	4	Dokumen					1	0	0
5	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis	Jumlah Orang yang	20	Orang					5	0	0
5	02	01	2.06		Administrasi Umum	Persentase	100	%					100	33.31	33.31
5	02	01	2.06	01	Penyediaan	Jumlah Paket	32	Paket					8	0	0
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang	Jumlah Paket Barang	52	Paket					13	13	100
5	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan	Jumlah Dokumen	16	Dokumen					4	1	25
5	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan	Jumlah Laporan	4	Laporan					1	1	100
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan	Jumlah Laporan	340	Laporan					85	30	35.2941176
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang	Persentase	100	%					100	16.67	16.67
5	02	01	2.07	06	Pengadaan	Jumlah Unit	360	Unit					90	15	16.6666667
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa	Persentase	100	%					100	55.87	55.87
5	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa	Jumlah Laporan	1420	Laporan					355	80	22.5352113
5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa	Jumlah Laporan	48	Laporan					12	3	25
5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa	Jumlah Laporan	48	Laporan					12	3	25
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang	Persentase barang	100	%					100	4.38	4.38
5	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa	Jumlah Kendaraan	80	Unit					20	4	20
5	02	01	2.09	05	Pemeliharaan	Jumlah Mebel yang	200	Unit					50	0	0
5	02	01	2.09	06	Pemeliharaan	Jumlah Peralatan	212	Unit					53	1	1.88679245
5	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Reha	Jumlah Sarana dan	12	Unit					3	0	0
5	02	01	2.09	11	Pemeliharaan/Reha	Jumlah Sarana dan	4	Unit					1	0	0
5	02	02			Program Pengelolaan	Persentase jumlah	100	%					100	0	0
						Persentase jumlah	100	%					100	100	100
5	02	02	2.01		Koordinasi dan	Persentase	100	%					100	0	0
5	02	02	2.01	01	Koordinasi dan	Jumlah Dokumen	8	Dokumen					2	0	0
5	02	02	2.01	02	Koordinasi dan	Jumlah Dokumen	8	Dokumen					2	0	0
5	02	02	2.01	07	Koordinasi dan	Jumlah Peraturan	16	Dokumen					4	0	0
5	02	02	2.01	08	Koordinasi dan	Jumlah Peraturan	16	Dokumen					4	0	0
5	02	02	2.01	09	Koordinasi dan	Jumlah Dokumen	4	Dokumen					1	0	0
5	02	02	2.01	11	Koordinasi	Jumlah Dokumen	20	Dokumen					5	0	0
5	02	02	2.02		Koordinasi dan	Prosentase	100	%					100	100	100
5	02	02	2.02	01	Koordinasi dan	Jumlah Dokumen	48	Dokumen					12	0	0
5	02	02	2.02	07	Koordinasi dan	Jumlah Laporan	8	Laporan					2	0	0

5	02	02	2.02	09	Rekonsiliasi Data	Jumlah Dokumen	16	Dokumen					4	0	0
5	02	02	2.02	11	Pembinaan	Jumlah Orang yang	440	Orang					110	0	0
5	02	02	2.03		Koordinasi dan	Prosentase	100	%					100	100	100
5	02	02	2.03	01	Koordinasi	Jumlah Laporan	48	Laporan					12	0	0
5	02	02	2.03	05	Koordinasi dan	Jumlah Rancangan	12	Dokumen					3	0	0
5	02	02	2.03	08	Penyusunan Analisis	Jumlah Dokumen	4	Dokumen					1	0	0
5	02	02	2.03	10	Penyusunan Sistem	Jumlah Sistem dan	4	Dokumen					1	0	0
5	02	02	2.03	11	Pembinaan	Jumlah Orang yang	440	Orang					110	0	0
5	02	02	2.04		Penunjang Urusan	Persentase	100	%					100	0	0
5	02	02	2.04	01	Pengelolaan Dana	Jumlah Dokumen	4	Dokumen					1	0	0
5	02	03			Program Pengelolaan	Persentase jumlah	100	%					100	0	0
5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang	Persentase	100	%					100	0	0
5	02	03	2.01	05	Penatausahaan	Jumlah Laporan	8	Laporan					2	0	0
5	02	03	2.01	07	Pengamanan Barang	Jumlah Laporan	20	Laporan					5	0	0
5	02	03	2.01	08	Penilaian Barang	Jumlah Laporan	8	Laporan					2	0	0
5	02	03	2.01	09	Pengawasan dan	Jumlah Laporan	4	Laporan					1	0	0
5	02	03	2.01	11	Rekonsiliasi dalam	Jumlah Laporan	4	Laporan					1	0	0
5	02	03	2.01	12	Penyusunan	Jumlah Laporan	16	Laporan					4	0	0
5	02	03	2.01	13	Pembinaan	Jumlah Orang yang	400	Orang					100	0	0

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Secara umum, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan telah dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi yaitu dari 3 sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Tahun 2021-2026 sudah dapat dilaksanakan seluruhnya, keberhasilan pencapaian sasaran di Tahun 2022, jika dihitung indikator keberhasilannya mencapai 100 %, sehingga dapat dikategorikan berhasil.

Dari beberapa sasaran yang telah dicapai tersebut masih terdapat perbedaan antara kondisi lapangan dengan yang diharapkan oleh masyarakat, hal ini nampak pada indikator kinerja yang digunakan pada pencapaian sasaran masih pada tingkat *output*, padahal yang menjadi harapan masyarakat adalah indikator kinerja pada tingkat *outcome*.

Tingkat capaian kinerja dalam rangka dukungan terhadap pencapaian visi dan misi Walikota Pasuruan, program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan mendukung pada pencapaian misi VI, yaitu "***Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata pemerintahan yang baik.***"

Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan, maka pada saat penyusunan Rencana Kinerja awal tahun telah dilakukan analisis dan evaluasi kinerja untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan kinerja. Berdasarkan analisis tersebut, maka pada akhirnya dapat disimpulkan adanya masalah kinerja yang akan dijadikan sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen untuk meningkatkan kinerja melalui alokasi, distribusi dan regulasi. Pencapaian kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan dapat dilihat pada tabel 2.2

Tabel 2.2 Pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah 2023 Kota Pasuruan

No	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis	
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Persentase laporan keuangan daerah sesuai ketentuan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Persentase penyusunan anggaran sesuai ketentuan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Persentase administrasi barang/aset daerah sesuai ketentuan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu penting berdasarkan tugas dan fungsi PD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi PD dimasa datang. Suatu kondisi/ kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Beberapa kendala dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PD diantaranya adalah keterbatasan sarana prasarana aparatur, keterbatasan sumber daya manusia dan keterbatasan anggaran yang ada.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan diantaranya adalah:

1. Masih belum seragamnya kemampuan sumberdaya manusia aparatur di beberapa SKPD, sehingga terjadi kesalahan maupun keterlambatan penyampaian laporan keuangan dan aset kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Pasuruan.
2. Masih belum tertibnya pengelolaan anggaran dan aset.
3. Belum optimalnya penerapan prinsip-prinsip penganggaran keuangan daerah.
4. Belum optimalnya pengelolaan barang milik daerah.
5. Masih ditemukannya permasalahan tata kelola perbendaharaan yang transparan dan akuntabel.
6. Kurang optimalnya kinerja aparatur dalam penyelenggaraan tata kelola keuangan.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan adalah :

1. Sarana dan prasarana kerja untuk menunjang pelaksanaan program masih belum tercukupi seluruhnya dan sesuai standart pelayanan minimal yang telah ditentukan sehingga apa yang diinginkan belum dapat terlaksana dengan baik.
2. Kualitas dan kuantitas aparatur pengelola keuangan dan aset masih belum sesuai dengan kebutuhan.

3. Perkembangan peraturan pengelolaan keuangan dan aset semakin kompleks dan berkembang secara terus menerus, hal ini membawa implikasi sulitnya membuat standarisasi terhadap tata kelola keuangan dan aset.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan acuan dalam proses penyusunan Rencana Kerja. Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan penjabaran Rencana Strategis ke dalam rencana operasional yang berfungsi untuk memelihara konsistensi antara capaian dan tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah. Hal ini dilakukan untuk menginventarisasi kegiatan-kegiatan yang akan diprioritaskan dikarenakan adanya keterbatasan anggaran sehingga akan terjadi kenaikan/penurunan baik jumlah kegiatan maupun anggaran yang direncanakan antara rancangan awal terhadap hasil analisis kebutuhan.

Evaluasi kinerja pembangunan daerah merupakan suatu proses untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah melalui evaluasi kinerja pembangunan akan dihasilkan kinerja yang dapat menjadi masukan bagi proses perencanaan dan penganggaran, yang didukung oleh ketersediaan informasi dan data yang lebih akurat, dengan demikian program pembangunan menjadi lebih efisien, efektif disertai dengan akuntabilitas pelaksanaannya yang jelas, oleh karena itu Berdasarkan prioritas pembangunan daerah Kota Pasuruan yang diuraikan dalam agenda utama pembangunan daerah Kota Pasuruan 2016 – 2021 dan RPJMD 2022 maka permasalahan yang timbul dalam proses pembangunan menyebabkan tingkat kesejahteraan hidup masyarakat yang memadai belum terealisasi. Dapat dilihat pada Tabel 2.3

Tabel 2.3 Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2024

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5											
5	02				24,858,423,886.00					20,020,891,379.00	
5	02	01			7,491,627,517.00				100%	6,927,285,674.00	
5	02	01	2.01		69,947,568.00				100%	81,458,960.00	
5	02	01	2.01	01	16,466,850.00				8 Dokumen	14,318,900.00	
5	02	01	2.01	06	10,595,088.00				3 Laporan	7,237,960.00	
5	02	01	2.01	07	42,885,630.00				1 Laporan	59,902,100.00	

5	02	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	100%	5,782,127,787.00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	100%	5,058,557,511.00	
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/bulan	5,376,293,447.00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/bulan	4,869,000,191.00
5	02	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	16 Dokumen	4,216,280.00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	16 Dokumen	3,666,140.00
5	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	69,553,035.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	15,713,160.00
5	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	24 Laporan	329,260,382.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	24 Laporan	167,739,380.00
5	02	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	2,804,643.00	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	2,438,640.00

5	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun	100%	84,168,339.00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun	100%	63,108,880.00	
5	02	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	84,168,339.00	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	63,108,880.00	
5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya	100%	118,306,425.00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya	100%	51,252,660.00	
5	02	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	8,218,935.00	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	13,752,660.00	
5	02	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	34 Orang	77,087,490.00	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	34 Orang	0,00	
5	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	33,000,000.00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	37,500,000.00	
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	100%	332,054,565.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	100%	300,489,520.00	

5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	12,826,065.00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	14,519,600.00
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	13 Paket	110,755,350.00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	13 Paket	99,487,920.00
5	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	4 Dokumen	4,160,700.00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	4 Dokumen	2,358,000.00
5	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	23,034,500.00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	25,610,000.00
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85 Laporan	181,277,950.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85 Laporan	158,514,000.00
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	100%	138,529,115.00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	100%	304,157,300.00
5	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	138,529,115.00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	304,157,300.00
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	100%	498,142,804.00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	100%	439,202,943.00

2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	310 Laporan	3,550,000.00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	310 Laporan	3,100,000.00
2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	152,766,102.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	138,838,393.00
2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	341,826,702.00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	297,264,550.00
2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100%	468,350,914.00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100%	629,057,900.00
2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	222,165,347.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	214,820,000.00
2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 Unit	4,014,530.00	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 Unit	3,440,000.00
2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	53 Unit	48,389,712.00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	53 Unit	42,007,900.00
2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	159,954,075.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	141,900,000.00

2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	33,827,250.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	226,890,000.00	
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase jumlah PD yang menyelesaikan penyusunan dokumen anggaran dengan benar dan tepat waktu	100%	15,550,170,059.00	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase jumlah PD yang menyelesaikan penyusunan dokumen anggaran dengan benar dan tepat waktu	100%	10,958,400,180.00	
2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase ketepatan waktu dalam penyusunan APBD	100%	2,278,941,660.00	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase ketepatan waktu dalam penyusunan APBD	100%	2,152,867,380.00	
2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	80,646,510.00	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	75,847,180.00	
2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	86,019,310.00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	74,109,100.00	
2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	4 Dokumen	728,408,390.00	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	4 Dokumen	657,248,800.00	
2.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD	4 Dokumen	635,238,610.00	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD	4 Dokumen	635,064,100.00	

2.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen	134,210,635.00	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen	123,867,500.00
2.01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	5 Dokumen	614,418,205.00	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	5 Dokumen	586,730,700.00
2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase ketepatan waktu penerbitan SP2D	100%	747,321,635.00	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase ketepatan waktu penerbitan SP2D	100%	649,804,800.00
2.02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen	223,202,925.00	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen	194,093,300.00
2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	2 Laporan	157,191,660.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	2 Laporan	136,637,500.00

2.02	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	4 Dokumen	48,344,275.00	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	4 Dokumen	42,038,500.00
2.02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	110 Orang	318,582,775.00	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	110 Orang	277,035,500.00
2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan Laporan Keuangan Daerah	100%	982,206,950.00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan Laporan Keuangan Daerah	100%	855,728,000.00
2.03	01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	12 Laporan	68,909,150.00	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	12 Laporan	59,022,000.00
2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	3 Dokumen	273,341,775.00	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	3 Dokumen	241,580,800.00

2.03	08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	89,660,900.00	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	77,663,200.00
2.03	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	-	64,869,775.00	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	-	56,220,600.00
2.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	110 Orang	485,425,350.00	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	110 Orang	421,241,400.00
2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase ketepatan waktu pelaporan urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	100%	11,541,699,814.00	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase ketepatan waktu pelaporan urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	100%	7,300,000,000.00
2.04	01	Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	11,541,699,814.00	Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	7,300,000,000.00
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase jumlah PD yang menyampaikan laporan barang milik daerah tepat waktu	100%	1,816,626,310.00	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase jumlah PD yang menyampaikan laporan barang milik daerah tepat waktu	100%	2,135,205,525.00
2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase penyusunan pengelolaan barang milik daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100%	1,816,626,310.00	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase penyusunan pengelolaan barang milik daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100%	2,135,205,525.00
2.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	147,155,610.00	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	147,154,100.00

2.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	147,155,610.00	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	147,154,100.00
2.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	5 Laporan	621,747,709.00	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	5 Laporan	888,549,200.00
2.01	08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	2 Laporan	27,901,093.00	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	2 Laporan	208,674,325.00
2.01	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	21,935,687.00	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	28,250,500.00
2.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan	573,204,919.00	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan	432,187,000.00
2.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	4 Laporan	24,866,197.00	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	4 Laporan	24,865,560.00
2.01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	100 Orang	399,815,095.00	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	100 Orang	405,524,840.00

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan nasional dan sumber daya yang ada, maka perlu disusun program pembangunan nasional dimana sekarang dikenal sebagai Program Nawacita yang merupakan program pembangunan perencanaan nasional yang memuat pencapaian visi dan misi bangsa. Untuk mendorong pelaksanaan program tersebut perlu adanya desentralisasi keuangan yang memungkinkan daerah dapat melaksanakan kewenangannya dengan tetap menjamin stabilitas ekonomi, yang terintegrasi dengan kebijakan daerah dalam rangka mendukung terwujudnya anggaran pemerintah daerah yang dapat menunjang tugas desentralisasi, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat.

Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2021-2025, pencapaian tujuan pembangunan nasional diprioritaskan untuk terwujudnya Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur yang menjadi Visi Indonesia.

Keberhasilan dalam pencapaian prioritas pembangunan secara nasional sangat tergantung dengan sinergitas kebijakan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Keterkaitan dengan kebijakan nasional Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan berusaha menyusun program dan kegiatan dengan mengacu kebijakan nasional dan kebijakan propinsi selain juga mengacu ke RPJP dan RPJMD Kota Pasuruan dengan maksud menjaga konsistensi dan kesinambungan perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan selaku koordinator perencanaan Anggaran di Kota Pasuruan telah berusaha mensinergikan kebijakan nasional dan kebijakan propinsi dalam PD terkait yang bersinggungan langsung dengan masyarakat melalui bidang-bidang yang berada di lingkup Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan.

Selain itu dalam lingkup Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan sendiri penyusunan program dan kegiatan juga disesuaikan dengan kebijakan nasional dan kebijakan propinsi. Untuk saat ini Badan Pengelolaan Keuangan Dan

Aset Kota Pasuruan telah menyusun beberapa kebijakan tentang koordinasi perencanaan pembangunan guna mendukung program pemerintah

3.2 Tujuan dan sasaran Rencana Kinerja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran adalah tahapan perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kerangka kerja PD selama lima tahun.

A. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target ini dapat merupakan ukuran kinerja faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan sifatnya lebih konkret daripada misi dan mengarah kepada suatu titik terang pencapaian hasil.

Dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas bagi organisasi mengenai arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi di masa mendatang. Dengan demikian, tujuan merupakan penjabaran lebih nyata dari perumusan visi dan misi.

Tujuan jangka panjang maupun jangka pendek (satu sampai dengan lima tahun) yang ingin dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan adalah sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai oleh Pemerintah Kota Pasuruan yaitu ***"Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik melalui pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel"***.

B. SASARAN

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik dan mudah dicapai. Dalam mewujudkan tujuan suatu organisasi diperlukan sasaran yang terarah agar komponen dalam satu organisasi memahami sasaran yang akan dicapai. Sasaran yang hendak dicapai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah :

1. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah.
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mewujudkan sasaran organisasi dengan indikator sasaran sebagai tolok ukur keberhasilannya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan menetapkan rencana program dan kegiatan organisasi dengan mengacu strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan Tahun 2024 yang berisi tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, rencana program, kegiatan berikut indikator kinerjanya diharapkan dapat menjadi pedoman dan arah pembangunan di Kota Pasuruan selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

Adapun rumusan rencana program dan kegiatan serta pagu indikatif tahun 2024 dan prakiraan maju tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1 Rumusan rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan prakiraan maju Tahun 2025

Kode	Urusan Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5	02	KEUANGAN			20,020,891,379.00	DAU			27,344,270,177.00		
5	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	100%	6,927,285,674.00	DAU	100%	8,240,792,372.00		
5	02	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	100%	81,458,960.00	DAU	100%	76,942,100.00	
5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	14,318,900.00	DAU	8 Dokumen	18,113,500.00
5	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	7,237,960.00	DAU	3 Laporan	11,654,500.00

5	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Laporan	59,902,100.00	DAU		1 Laporan	47,174,100.00
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu		100%	5,058,557,511.00	DAU		100%	6,360,341,199.00
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		37 Orang/bulan	4,869,000,191.00	DAU		37 Orang/bulan	5,913,922,791.00
5	02	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		16 Dokumen	3,666,140.00	DAU		16 Dokumen	4,637,908.00
5	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		2 Laporan	15,713,160.00	DAU		2 Laporan	76,508,500.00
5	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		24 Laporan	167,739,380.00	DAU		24 Laporan	362,186,500.00
5	02	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1 Dokumen	2,438,640.00	DAU		1 Dokumen	3,085,500.00
5	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun		100%	63,108,880.00	DAU		100%	92,585,500.00

5	02	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		1 Laporan	63,108,880.00	DAU		1 Laporan	92,585,500.00
5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya		100%	51,252,660.00	DAU		100%	130,137,239.00
5	02	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		1 Dokumen	13,752,660.00	DAU		1 Dokumen	9,041,000.00
5	02	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		34 Orang	0,00	DAU		34 Orang	84,796,239.00
5	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		5 Orang	37,500,000.00	DAU		5 Orang	36,300,000.00
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran		100%	300,489,520.00	DAU		100%	365,260,350.00
5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		8 Paket	14,519,600.00	DAU		8 Paket	14,109,000.00

5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	13 Paket	99,487,920.00	DAU		13 Paket	121,830,885.00
5	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	2,358,000.00	DAU		4 Dokumen	4,576,770.00
5	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	25,610,000.00	DAU		1 Laporan	25,337,950.00
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85 Laporan	158,514,000.00	DAU		85 Laporan	199,405,745.00
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	100%	304,157,300.00	DAU		100%	152,382,026.00
5	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	304,157,300.00	DAU		10 Unit	152,382,026.00
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	100%	439,202,943.00	DAU		100%	547,957,500.00
5	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	310 Laporan	3,100,000.00	DAU		310 Laporan	3,905,000.00
5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	138,838,393.00	DAU		12 Laporan	168,043,000.00
5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	297,264,550.00	DAU		12 Laporan	376,009,500.00

5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara		100%	629,057,900.00	DAU		100%	515,186,458.00
5	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		20 Unit	214,820,000.00	DAU		20 Unit	244,382,000.00
5	02	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		50 Unit	3,440,000.00	DAU		50 Unit	4,415,983.00
5	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		53 Unit	42,007,900.00	DAU		53 Unit	53,229,000.00
5	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		3 Unit	141,900,000.00	DAU		3 Unit	175,949,500.00
5	02	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	226,890,000.00	DAU		1 Unit	37,209,975.00
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase jumlah PD yang menyelesaikan penyusunan dokumen anggaran dengan benar dan tepat waktu		100%	10,958,400,180.00	DAU		100%	17,105,188,134.00

5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase ketepatan waktu dalam penyusunan APBD	100%	2,152,867,380.00	DAU		100%	2,506,836,602.00
5	02	02	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	75,847,180.00	DAU		2 Dokumen	88,711,161.00
5	02	02	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	74,109,100.00	DAU		2 Dokumen	94,621,241.00
5	02	02	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	4 Dokumen	657,248,800.00	DAU		4 Dokumen	801,249,229.00
5	02	02	2.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	4 Dokumen	635,064,100.00	DAU		4 Dokumen	698,762,471.00
5	02	02	2.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen	123,867,500.00	DAU		1 Dokumen	147,632,000.00
5	02	02	2.01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	5 Dokumen	586,730,700.00	DAU		5 Dokumen	675,860,500.00

5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase ketepatan waktu penerbitan SP2D		100%	649,804,800.00	DAU		100%	822,053,797.00
5	02	02	2.02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah		12 Dokumen	194,093,300.00	DAU		12 Dokumen	245,523,217.00
5	02	02	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		2 Laporan	136,637,500.00	DAU		2 Laporan	172,910,826.00
5	02	02	2.02	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait		4 Dokumen	42,038,500.00	DAU		4 Dokumen	53,178,702.00

5	02	02	2.02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	110 Orang	277,035,500.00	DAU		110 Orang	350,441,052.00
5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan Laporan Keuangan Daerah	100%	855,728,000.00	DAU		100%	1,080,427,940.00
5	02	02	2.03	01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	12 Laporan	59,022,000.00	DAU		12 Laporan	75,800,065.00
5	02	02	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	3 Dokumen	241,580,800.00	DAU		3 Dokumen	300,676,000.00
5	02	02	2.03	08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	77,663,200.00	DAU		1 Dokumen	98,626,990.00

5	02	02	2.03	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	-	56,220,600.00	DAU	-	71,357,000.00
5	02	02	2.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	110 Orang	421,241,400.00	DAU	110 Orang	533,967,885.00
5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase ketepatan waktu pelaporan urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	100%	7,300,000,000.00	DAU	100%	12,695,869,795.00
5	02	02	2.04	01	Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	7,300,000,000.00	DAU	1 Dokumen	12,695,869,795.00
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase jumlah PD yang menyampaikan laporan barang milik daerah tepat waktu	100%	2,135,205,525.00	DAU	100%	1,998,289,671.00
5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase penyusunan pengelolaan barang milik daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100%	2,135,205,525.00	DAU	100%	1,998,289,671.00
5	02	03	2.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	147,154,100.00	DAU	2 Laporan	161,871,171.00
5	02	03	2.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	5 Laporan	888,549,200.00	DAU	5 Laporan	683,922,500.00

5	02	03	2.01	08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	2 Laporan	208,674,325.00	DAU		2 Laporan	30,691,500.00
5	02	03	2.01	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	28,250,500.00	DAU		1 Laporan	24,129,500.00
5	02	03	2.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan	432,187,000.00	DAU		1 Laporan	630,525,500.00
5	02	03	2.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	4 Laporan	24,865,560.00	DAU		4 Laporan	27,353,000.00
5	02	03	2.01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	100 Orang	405,524,840.00	DAU		100 Orang	439,796,500.00

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024 ini merupakan rencana kerja tahunan dalam menunjang tercapainya visi Walikota dan Wakil Walikota Pasuruan terpilih periode 2021-2026 yaitu **"PASURUAN KOTA MADINAH (Maju Ekonominya, Indah Kotanya, Harmoni Warganya)"** pada misi IV yaitu **"Transformasi Layanan Publik yang Mudah dan Cepat Melalui Digitalisasi Manajemen dan Birokrasi yang Adaptif "** yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah Pemerintah Kota Pasuruan 2024. Secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa di dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan Tahun 2024 telah mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
2. Program dan kegiatan yang direncanakan telah disesuaikan dengan RPJPD, RPJMD Kota Pasuruan dan RENSTRA serta RKPD.
3. Dengan terbatasnya kemampuan keuangan daerah maka program/kegiatan dilaksanakan dengan memperhatikan skala prioritas.

Dalam pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Keuangan dan Aset, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan hendaknya dapat dilaksanakan secara konsisten, transparan, akuntabel, profesional, partisipatif dan penuh tanggungjawab dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Perangkat Daerah Kota Pasuruan berkewajiban menyusun Rencana Strategis yang memuat visi, misi, tujuan strategis, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD masing-masing, yang berpedoman pada RPJMD Kota Pasuruan, yang nantinya akan menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja OPD;
2. Pembinaan, pengendalian, koordinasi, fasilitasi dan penyelenggaraan dalam pengelolaan keuangan daerah;
3. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset;

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kedepan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan dalam penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan dengan sesama Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kota Pasuruan maupun dengan Perangkat Daerah yang membidangi fungsi lain.

Demikian dengan tersusunnya Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan Tahun 2024 ini agar senantiasa dapat dijadikan acuan kerja dalam melaksanakan setiap kegiatan dan tugas-tugas yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan.

Pasuruan, Januari 2024
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
KOTA PASURUAN



Drs. MOCHAMAD AMIEN, MM
NIP. 19691003 199003 1 006